



KABUPATEN SUMBAWA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA
TA. 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNNK Sumbawa dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Pelaksanaan Operasi Bersinar, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, BNNK Sumbawa sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan

kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumbawa.

2. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Sumbawa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Masyarakat dan Swasta
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

4. Kewenangan

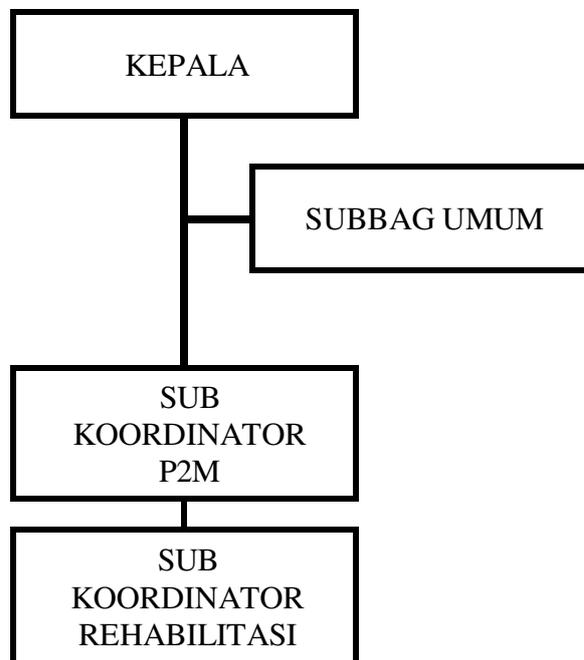
Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kabupaten Sumbawa berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

1. Kepala BNNK Sumbawa : Denny Priadi, S.Sos.
2. Kepala Subbag Umum : Ahmady, A.Md.
3. Sub Koordinator P2M : Nursyafuddin, A.Md.
4. Sub Koordinator Rehabilitasi : Ellyah Andriany, S.KM.

STRUKTUR ORGANISASI BNNK SUMBAWA



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Perencanaan Kinerja
 - Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - Bab IV Penutup
- Lampiran
1. Perjanjian Kinerja
 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh pada RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkannya BNN memiliki sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

BNNK Sumbawa sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2020 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2023.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNK Sumbawa, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNK Sumbawa dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN.

Adapun Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian/Lembaga : BNNK Sumbawa

Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78,80 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase panyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	60%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik rehabilitasi	3,3 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92 Indeks

10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
----	--	---	-----------

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil dari evaluasi dan pengukuran dari capaian kinerja per Triwulan nya disusun dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kemajuan Triwulan II.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Periode Triwulan II TA. 2023

Capaian kinerja BNNK Sumbawa merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Tahun 2023 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) indikator.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 10 (sepuluh) sasaran strategis tahun 2023 dan penjelasan hasil capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Triwulan II TA. 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	51 Indeks	0 Indeks	0%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkotika	78,80 Indeks	39,4 Indeks	50%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	0 Indeks	0%

4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase panyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	60%	0%	0%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	0 Lembaga	0%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2 Unit	0 Unit	0%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas klinik Rehabilitasi	3,3 Indeks	0 Indeks	0%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	92 Indeks	46 Indeks	50%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	46 Indeks	50%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Sumbawa selama kurun waktu Triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51	0	0%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
 - b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum ada capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan, dimana rangkaian kegiatan baru dimulai dan menunggu juknis dari BNN RI.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba dilakukan secara masif dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sehingga hasil yang di peroleh dengan kategori tinggi.
2. Kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa masuk dalam kategori tinggi;
3. Terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana sekolah seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orientasi sekolah pada siswa baru;
4. Terjalannya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah kabupaten”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (0/51) * 100\%$ $= 0\%$	- $\sum \text{RIK}$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri - $\sum \text{TIK}$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa peserta yang kurang aktif saat pelaksanaan.
2. Pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja yang terkadang sulit dipahami oleh beberapa siswa;
3. Masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN;
4. Kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNN Kabupaten Sumbawa sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Koordinasi yang perlu ditingkatkan lagi sehingga proses pelaksanaan dari pemetaan sehingga pelaksanaan dapat dilaksanakan lebih baik lagi.
2. Pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami;
3. Menjalinkan kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
4. Koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

2.	Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Faktor Resiko Penyalahgunaan Narkoba	78,80	39,4	50%

Definisi operasional dari jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah kabupaten/kota adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

Metode pengukuran jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah kabupaten dengan kriteria yaitu :

1. Menghitung jumlah Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di kabupaten;
2. Kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Questionares), PAFAS (Parent And Familiy Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2023;
3. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 - c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 - c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 - c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 - c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sudah 50%, dimana indeks ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahguna narkoba sedang berada dalam tahap proses kegiatan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Koordinasi yang baik telah dilakukan dengan pemerintahan desa BERSINAR, sehingga dalam pemetaan peserta berjalan lancar dan peserta yang mengikuti kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa di wilayah Kabupaten Sumbawa;
3. Antusiasme orang tua murid dari kegiatan dialog interaktif keluarga sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (39,4/78,80) * 100\%$ $= 50\%$	- \sum RIK = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga - \sum TIK = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, sehingga kegiatan terlalu dekat jarak pelaksanaannya dengan kegiatan

selanjutnya.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah lebih fokus dalam pembuatan timeline kegiatan, sehingga pada saat pelaksanaan sesuai dan hasil yang di peroleh bisa lebih baik lagi.

3.	Sasaran : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	0	0%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

a.1. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

a.2. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

a.3. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

a.4. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui

kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

a.5. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

a.6. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

- b. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
 - b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
 - b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
 - b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
 - b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri
- c. Kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum ada capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan, dimana rangkaian kegiatan baru dimulai dan menunggu juknis dari BNN RI.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Terjalannya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNNK Sumbawa dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.
2. Semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
3. Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
4. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “Indeks Kemandirian Partisipasi”, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	$= (\sum RIK / \sum TIK) * 100$	$= (0/3,25) * 100$ $= 0\%$	- $\sum RIK$ = Jumlah Realisasi IKP - $\sum TIK$ = Jumlah Target IKP

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih ada beberapa lembaga yang kurang aktif dalam melakukan upaya P4GN dan beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi serta kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN dan terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

4.	Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	60%	0%	0%

Definisi operasional dari penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba memiliki persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standard dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki

capital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.

Metode pengukuran persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF yang sudah disediakan petugas;
2. Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
3. Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
4. Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum ada capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan, dimana rangkaian kegiatan baru dimulai dan menunggu juknis dari BNN RI.

5. Sasaran : Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100%

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Pada Triwulan II Tahun 2023 capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 100% dimana jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sudah memenuhi target yang telah di

tetapkan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan dari perangkat desa dalam layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat diwilayahnya;
2. Ada beberapa desa yang memasukkan anggaran P4GN dalam kegiatan APBDes dalam mendukung program rehabilitasi diwilayahnya;
3. Koordinasi & kerja sama serta dukungan kepala desa, lurah, dan masyarakat.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$= (\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$= (5/5) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum \text{RIP}$ = Jumlah Realisasi petugas - $\sum \text{TIP}$ = Jumlah Target petugas

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Ada beberapa desa yang tidak aktif dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi IBM (belum ada klien yang melaporkan diri untuk mengikuti program rehabilitasi);
2. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang bahaya narkoba, sehingga perlu usaha lebih untuk menjalankan program IBM;

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya jika terdapat keluarga atau kerabatnya yang memiliki ketergantungan narkoba;

2. Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi setelah melaksanakan pelatihan kepada petugas IBM supaya keterampilan dalam melaksanakan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan baik.

6.	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	0 Lembaga	0%

Definisi operasional dari jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional adalah fasilitas milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap dan/atau rawat jalan) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

Metode pengukuran jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional di Kabupaten Sumbawa.
- b. Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum ada capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan, dimana rangkaian kegiatan baru dimulai dan menunggu juknis dari BNN RI.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait layanan lembaga rehabilitasi.
2. Mendorong layanan dengan merujuk klien dari hasil SIL dan atau setelah dilakukan assessment di klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa.

Formula yang digunakan untuk mengukur terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	$=(\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$=(0/1) * 100\%$ $=0\%$	- \sum RIP = Jumlah Realisasi fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah - \sum TIP = Jumlah Target fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 secara jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah menunjukkan terjadi jumlah fasilitas yaitu dari 1 fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional pada tahun 2020.

Persamaan jumlah fasilitas rehabilitasi milik pemerintah yang operasional disebabkan karena Lembaga Rehabilitasi baik IPWL maupun non IPWL belum siap untuk melakukan layanan rehabilitasi yang antara lain disebabkan karena Kurangnya fasilitas Rehabilitasi yang sesuai standar dan kurangnya tenaga/petugas rehabilitasi yang tersertifikat pada Lembaga Rehabilitasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Ketika lembaga tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi;
2. Kualitas layanan dibawah standar sehingga klien tidak merasakan manfaat atas layanan;
3. Tidak dilakukan inervensi terhadap keluarga;
4. Tidak membentuk kelompok dukungan terutama pada komunitas di wilayah yang prevalent;

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Melakukan koordinasi melalui rapat dan secara langsung dengan Dinas Kesehatan untuk dorongan layanan;
2. Melibatkan Seksi Kesehatan Jiwa dan Napza Dinas Kesehatan setempat untuk dorongan skrining di fasyankes Tk.I;
3. Sosialisasi rehabilitasi dan pascarehabilitasi oleh jejaring dinas kesehatan, puskesmas pembantu dan kader kesehatan;
4. Memasukkan point layanan rehabilitasi dalam penilaian akreditasi di pelayanan kesehatan;
5. Menghimbau kepada Pemkot (Dinas Kesehatan) agar tidak melakukan mutasi kepada para tenaga yang baru saja diberikan latihan terkait rehabilitasi.

7	Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba
----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	2 Unit	0 Unit	0%

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kabupaten adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Kabupaten dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam

satu tahun anggaran.

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum ada capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan, dimana rangkaian kegiatan baru dimulai dan menunggu juknis dari BNN RI.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah dan stakeholder terkait.
2. Sosialisasi tentang pentingnya layanan rehabilitasi IBM sebagai solusi atas kendala sulitnya akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, terutama dimasyarakat dengan kurangnya akses informasi.
3. Antusias masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan program P4GN.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah kabupaten”, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	$= (\sum RN / \sum TN) * 100$	$= (0/2)*100$ $= 0\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi penyelenggara layanan rehabilitasi IBM - $\sum TN$ = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah ada beberapa LSM yang ingin menjadi LRKM tapi mereka ragu untuk proses perijinan dsb.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja kedepan adalah berkolaborasi dengan LRKM untuk melakukan penjangkauan dan pendampingan.

8.	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba.
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,3	0	0%

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan II Tahun 2023 belum ada capaian kinerja yang didapat dari pelaksanaan kegiatan, dimana rangkaian kegiatan baru dimulai dan menunggu juknis dari BNN RI.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya semangat kerja yang tinggi dari para personil dan kerjasama tim yang solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa”, adalah sebagai berikut :

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(0/3.3) * 100\%$ $=0\%$	- \sum RIK = Jumlah Realisasi Indeks Kepuasan - \sum TIK = Jumlah Target Indeks Kepuasan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah Organisasi lembaga swadaya masyarakat sebagian besar hanya bergerak pada ranah preventif saja atau upaya-upaya pencegahan, kampanye anti Narkoba dsb masih sedikit yang ke arah rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah melakukan upaya sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakholder terkait dalam upaya memberikan layanan Rehabilitasi gratis dan sosialisasi terkait pentingnya Lembaga Rehabilitasi berbasis Masyarakat.

9.	Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan Efisien
----	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi TW II	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sumbawa	92	46	50%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN adalah Kinerja Anggaran yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L.

Hasil yang diperoleh BNNK Sumbawa pada Triwulan II tahun 2023 adalah **50%** (kriteria "Cukup").

Formula yang digunakan untuk mengukur persentase capaian kinerja pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	$= (\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$= (46/92) * 100\%$ $= 50\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu beberapa kegiatan mengacu kepada juknis dari Pusat sehingga realisas anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah disusun.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.	Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai Prosedur
-----	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa	92	46	50%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang - undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari **target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar **92** untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Kabupaten Sumbawa pada Triwulan II tahun 2023 dapat **terrealisasi** sebesar **46** atau sebesar **50%**.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa”, adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa	$= (\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100$	$= (46/92) * 100$ $= 50\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNN Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2023.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu beberapa kegiatan mengacu kepada juknis dari Pusat sehingga realisas anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah disusun.

Rekomendasi/ rencana aksi kedepan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai realisasi anggaran BNNK Sumbawa untuk Triwulan II 2023, yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI TW II 2023 (Rp)	Persentase
BNN Kab. Sumbawa	1.639.847.000	879.242.354	53,6%
TOTAL	1.639.847.000	879.242.354	53,6%

Tahun 2023 BNNK Sumbawa mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.639.847.000** dengan realisasi Triwulan II sebesar **Rp. 879.242.354** atau dengan persentase penyerapan sebesar **53,6%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kemajuan Triwulan II BNN Kabupaten Sumbawa Tahun 2023, merupakan bahan masukan dalam penyusunan LKIP BNN Kabupaten Sumbawa tahun 2023 yang adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Sumbawa sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Sumbawa telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024 sesuai Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar BNNK Sumbawa yaitu :

- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Rehabilitasi
- 3) Sub Bagian Umum

serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNK Sumbawa dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNK Sumbawa pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan yang tercantum pada 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNK Sumbawa.

Segala rencana perbaikan kedepan untuk tahun berikutnya diharapkan agar dapat dilaksanakan sehingga setiap tahunnya kinerja BNNK Sumbawa semakin lebih baik.

Partisipasi dari seluruh masyarakat, jajaran pemerintah, swasta, penegak hukum, dan seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program P4GN di Kabupaten Sumbawa sehingga cita-cita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sumbawa Bebas Narkoba dan Indonesia Bersih dari Narkoba dapat terwujud.

Sumbawa Besar, 30 Juni 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Sumbawa



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "BADAN NARKOTIKA NASIONAL" at the top and "KABUPATEN SUMBAWA" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "KEPALA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Hurri Nugroho".

Hurri Nugroho, SH., MH